

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Pembagian Bansos Amburadul

Anggota Dewan Ungkap Perbedaan Jumlah dan Nilai Paket Bansos di DKI

JAKARTA—Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari, mengkritik pembagian bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta yang dinilai amburadul dan tidak adil.

Eneng mengkritik paket bansos Kemensos tahap pertama dan ketiga. Eneng mempersalahkan perbedaan barang dan nilai bansos yang diterima oleh warga di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Baca juga: Merasa Salah Sasaran, Warga Pasar Rebo Kaget Dapat Paket Bansos Pemprov DKI

"Wah, kacau sih. Jadwal distribusi juga sulit diakses, vendor penyedia enggak transparan juga. Item bantuan ini kenapa berbedanya atau selisih itemnya banyak?" kata Eneng di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Menurutnya, jumlah besaran dan paket bansos di Jakarta Barat berbeda dengan di Jakarta Timur. Adanya selisih itulah yang dinilai Eneng sebagai tidak adil. Menurut Eneng, meskipun berbeda vendor yang

mendistribusikan bansos, harga dan item bansos seharusnya disamakan.

Vendor yang mendistribusikan bansos di Jakarta Timur adalah Food Station sedangkan yang di Jakarta Barat belum diketahui. "Standar item bansos ini (setahu saya) standar ke atas. Seperti Indomie jika diganti harus dengan mie harga setara Indomie atau lebih dari harga Indomie. Juga yang lainnya," kata dia. Eneng juga mengkritik informasi bansos Kemensos yang terbilang sangat minim.

"Beda-beda vendor, tapi di website Kemensos infonya terbatas banget. Jadwal distribusi juga sulit diakses, vendor penyedia enggak transparan juga," ujar dia. Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Pemprov DKI dan pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebanyak 2,5 juta KK (kepala keluarga) di Jakarta. Penyaluran bansos berlangsung sejak Rabu (3/6/2020).

Dalam mengatasi masalah masyarakat terdampak pandemi virus Corona, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Kementerian Sosial dalam menyediakan bantuan sosial (bansos). Di masa PSBB Transisi ini, bansos yang disalurkan mencapai tahap ketiga.

"Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Kementerian Sosial RI telah selesai menyalur-

kan bantuan sosial tahap ketiga kepada warga Jakarta, baik yang berkTP DKI ataupun non DKI kurang mampu dan rentan terdampak Covid-19," ujar Pras.

"Bansos telah didistribusikan dari Rabu ketiga Juni untuk 2,5 juta KK," sambungnya. Politikus PDI Perjuangan ini berharap bansos yang tersalurkan bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. "Semoga bantuan sosial tersebut tepat sasaran untuk saudara-saudara kita yang benar membutuhkan," pungkasnya.

Sementara itu Kementerian Sosial (Kemensos) RI membantah adanya besaran perbedaan atau pun kecurangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan Presiden (banpres) dari pemerintah pusat untuk warga Jakarta yang terdampak Covid-19. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Pepen Nazaruddin mengatakan, setiap paket bansos yang disalurkan pihaknya tetap senilai Rp 300 ribu per paket dan tak ada perbedaan di setiap kota. "Tentunya tidak mengurangi nilai jumlah bantuan," ujar Pepen di Jakarta.

Bukti Keseriusan

Sebelumnya, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak virus corona (COVID-19) di GOR Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Bantuan itu diserahkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara didampingi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat.

GOR Karet merupakan tempat penampungan sementara bagi warga terdampak akibat COVID-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta. Mensos menyerahkan bantuan sosial sembako dan asistensi rehabilitasi sosial kepada sejumlah pihak. Di antaranya bantuan sembako 2781 paket untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Balarenik.

Kemudian bantuan sembako untuk warga terdampak yang tinggal di GOR, bantuan sembako untuk Balai Mulya Jaya Jakarta sejumlah 242 paket dan asistensi rehabilitasi sosial 385 paket, sementara Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan sembako sejumlah 2027 paket dan asistensi rehabilitasi sosial 100 paket.

Mensos menyampaikan apresiasi kepada pemerintah DKI Jakarta khususnya Dinas Sosial dan Walikota Jakarta Pusat atas kerjasama dalam penanganan warga terdampak akibat COVID-19. "Ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan layanan pada warga yang terdampak

COVID-19, serta menegaskan bahwa negara hadir dalam upaya penanganan pandemik virus corona khususnya di DKI Jakarta" ujar Juliari.

Mensos berharap kerjasama yang baik selama ini agar tetap dipertahankan, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial. Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB menjadi masa transisi hingga 18 Juni 2020 sebagai upaya penanggulangan penyebaran wabah virus corona (COVID-19).

Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melakukan pendekatan-pendekatan yang salah satunya berbasis tempat penampungan sementara. Pada pendekatan ini, Kemensos bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan TPS berupa GOR yang berfungsi untuk menampung sementara warga terdampak hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di jalan/ruang publik.

Di GOR ini, mereka akan didata, dicek kesehatan dan diberi makan yang berasal dari dapur umum. Dapur umum ini dikelola oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kemensos bekerja sama dengan Suku Dinas Sosial setempat. Bagi mereka yang masih memiliki keluarga, akan dipulangkan oleh Kemensos. (dmi)